

BOOKLET INDEKS DEMOKRASI INDONESIA JAWA TENGAH 2014



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BOOKLET INDEKS DEMOKRASI
INDONESIA
JAWA TENGAH
2014**



<http://jianteng.go.id>

**BOOKLET INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
JAWA TENGAH 2014**

ISBN : 978-602-0916-60-6
No. Publikasi : 33520.1513
Katalog BPS : 4601006.33
Ukuran Buku : 10,5 cm x 14,8 cm
Jumlah Halaman : v + 31 halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR


Booklet Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah Tahun 2014 menyajikan data seputar aspek, variable dan indikator IDI di Provinsi Jawa Tengah yang dianalisa secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan demokrasi di Jawa Tengah.

Materi yang disajikan dalam booklet ini memuat hal-hal yang terkait dengan perkembangan aspek, variable, dan indikator IDI. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan demokrasi di Jawa Tengah.

Penyajian informasi diuraikan secara sederhana dalam bentuk tabel, gambar serta gambaran ringkas agar mudah dipahami. Semoga bermanfaat.

Semarang, November 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah



 **Drs. Ibram Syahboedin, MA**

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
I. Apa itu IDI?	1
II. Mengapa IDI Diperlukan?	3
III. Apa Manfaat IDI?	5
IV. Bagaimana Metodologi IDI?	7
V. Gambaran Umum IDI Indonesia	15
VI. IDI Jawa Tengah 2014	19
VII. Penutup	31

I. Apa itu IDI ?

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang *country specific*; dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia, yaitu antara lain terkait dengan realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika pegeseran relasi antara negara dan masyarakat pada periode reformasi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naikturunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi dan hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi, IDI juga digunakan untuk mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat.

II. Mengapa IDI Diperlukan?

Setelah lima belas tahun berjalan sejak Reformasi pada tahun 1998, muncul pertanyaan sejauhmana sesungguhnya perkembangan demokrasi yang telah terjadi, khususnya pada tingkat provinsi? Sebab, selama ini perbedaan kinerja demokrasi antar daerah, walaupun dapat dirasakan, namun tidak dapat digambarkan secara jelas dalam aspek-aspek atau factor-faktor penyumbang-nya. Upaya menjelaskannya biasanya terbatas pada pemahaman yang parsial dan tidak disertai data empirik yang kuat.

Perbedaan kinerja demokrasi antardaerah, biasanya, dikaitkan dengan faktor struktural (tingkat perkembangan ekonomi), kultural (agama), dan sosio-historikal (tingkat pendidikan, homogenitas/heterogenitas demografi) secara umum tanpa bukti empiris yang lebih spesifik.

Penjelasan-penjelasan tersebut acap menciptakan perspektif yang sumir dan spekulatif, sehingga tidak banyak bermanfaat bagi upaya-upaya sistematis untuk menjaga dan memacu perkembangan demokrasi di Indonesia.

Tidak adanya ukuran yang obyektif juga menyulitkan perbandingan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain; sulitnya mendapatkan *lesson learned*, dan diseminasi dari praktik-praktik yang baik Sehingga, langkah-langkah kongkrit untuk pembangunan demokrasi sulit direncanakan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif yang diharapkan memicu diskursus di antara pemangku kepentingan, mendorong kompetisi yang sehat dan berbagi (*sharing*) pengalaman di antara pemerintah daerah, serta menyediakan data yang sangat dibutuhkan terkait dengan ranah pembangunan demokrasi yang perlu mendapat perhatian.

III. Apa Manfaat IDI?

IDI diharapkan memiliki sejumlah manfaat. Utamanya adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia yang didasarkan atas data-data dengan tolok ukur yang jelas. Data-data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia,
2. Bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi, data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Seluruh pemangku kepentingan dapat menunjuk data IDI sebagai rujukan dalam proses deliberasi perumusan kebijakan dan program pembangunan politik/ demokrasi berdasarkan bukti-bukti empiris.

3. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholder*, tidak hanya pemerintah saja.

IV. Bagaimana Metodologi IDI?

Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Secara keseluruhan terdapat tiga tahapan pengumpulan data IDI, yaitu:

1. Koding surat kabar dan koding dokumen

Semua peristiwa yang terkait indikator IDI yang diberitakan periode Januari – Desember 2014 pada surat kabar yang telah dipilih, yakni surat kabar lokal dengan oplah tertinggi. Provinsi Jawa Tengah menggunakan surat kabar Suara Merdeka. *Review* dokumen, semua dokumen tertulis yang masih berlaku dan terkait dengan indikator IDI dalam rentang waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Dokumen dapat berupa catatan, laporan, *press release*, Perda, surat edaran, maupun Surat Keputusan.

2. *Focus Group Discussion* (FGD) IDI

FGD berfungsi sebagai untuk melengkapi kekurangan yang berasal dari data kuantitatif . Dalam FGD, hasil *review* surat kabar dan dokumen dijadikan acuan

untuk mengklarifikasi berita/data, dan menggali data yang sangat mungkin luput diberitakan oleh surat kabar.

3. Wawancara Mendalam (WM) IDI

Dilakukan untuk menjangkau fakta/kejadian yang mungkin masih terlewat, atau sudah tertangkap namun kurang lengkap deskripsi dan fakta pendukungnya, karena tidak memungkinkan dieksplorasi secara detail dalam forum FGD. Nara sumber WM adalah orang-orang terpilih yang memang banyak mengetahui fakta tertentu yang terkait indikator IDI.

Seluruh tahapan kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada indikator-indikator yang disusun dari turunan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Dari tiga aspek tersebut kemudian diturunkan menjadi 11 variabel yang kemudian dijabarkan lagi melalui 28 indikator teknis.

Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2014

Aspek	Variabel	Indikator
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	1. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
		2. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
	2. Kebebasan Berpendapat	1. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
		2. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
	3. Kebebasan Berkeyakinan	1. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
		2. Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
		3. Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	1. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
		2. Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst
		3. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender

Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2014 (lanjutan)

Aspek	Variabel	Indikator
2. Hak-Hak Politik	1. Hak Memilih dan Dipilih	1. Hak memilih atau dipilih terhambat
		2. Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
		3. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		4. <i>Voters turnout</i>
		5. Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Provinsi
	2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	1. Demonstrasi/mogok yang Bersifat Kekerasan
		2. Pengaduan Masyarakat Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Lembaga Demokrasi	1. Pemilu yang Bebas dan Adil	1. Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
		2. Kecurangan dalam penghitungan suara
	2. Peran DPRD	1. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
		2. Perda yang merupakan inisiatif DPRD
		3. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif

Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2014 (lanjutan)

Aspek	Variabel	Indikator
3. Lembaga Demokrasi	3. Peran Partai Politik	1. Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu
		2. Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik
	4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	1. Laporan Penggunaan Fasilitas Pemerintah untuk Kepentingan parpol dalam Pemilu Legislatif
		2. Laporan Keterlibatan PNS dalam Kegiatan Parpol Peserta Pemilu Legislatif
	5. Peran Peradilan yang Independen	1. Keputusan Hakim yang Kontroversial
		2. Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi

Penyusunan IDI dilakukan dengan cara skoring yang terdiri dari dua level yaitu level 1 merupakan skoring data kuantitatif sesuai temuan koding surat kabar dan koding dokumen dan level 2 merupakan skoring data kualitatif melalui *expert judgement*.

Skoring data kuantitatif (hasil koding surat kabar dan dokumen) bersifat *complementary data* yang artinya data tertinggi/terbesar hasil pengukuran pada koding Koran atau koding dokumen diambil sebagai perhitungan skor. Sedangkan skoring data kualitatif (hasil FGD dan *in-depth interview*), berlaku penilaian (penambahan/pengurangan) 10 persen terhadap capaian data kuantitatif.

Tahapan selanjutnya, masing-masing aspek, variable dan indikator IDI dibobot oleh juri ahli (*expert judge*) yang terdiri dari unsur perempuan, akademisi, praktisi/politisi, pejabat pemerintahan, NGO/LSM dan purnawirawan TNI/Polri, dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya,

untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

V. Gambaran Umum IDI Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional 2014 sebesar 73,04 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 9,32 poin dibandingkan dengan IDI nasional 2013 sebesar 63,72, serta melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 sebesar 73,00 meskipun secara umum masih dalam kategori sedang.

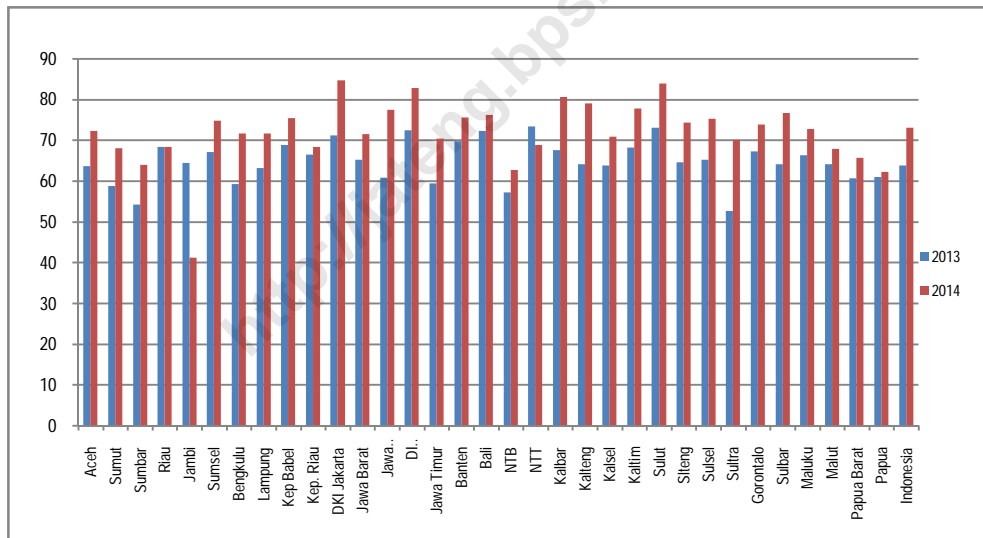
Angka IDI 2014 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil dengan rata-rata nasional 82,62; aspek Hak-hak Politik sebesar 63,72; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 75,81.

Terdapat empat provinsi mengalami kenaikan kinerja demokrasi dari kategori “sedang” menjadi “baik” yakni DKI Jakarta naik dari 71,18 pada 2013 menjadi 84,70 pada 2014. Tiga provinsi lainnya adalah DI Yogyakarta naik dari 72,36 pada 2013 menjadi 82,71 pada 2014; Kalimantan Barat naik dari 67,51 pada 2013 menjadi 80,58 pada 2014 dan Sulawesi Utara yang naik dari 73,11

pada 2013 menjadi 83,94 pada 2014. Capaian empat provinsi menembus kategori kinerja demokrasi “baik” merupakan hal yang baru terjadi selama enam tahun pengukuran IDI.

Sebanyak 29 provinsi lainnya berada dalam kinerja demokrasi kategori “sedang”. Suatu realita bahwa pada 2014 semua provinsi berada pada kategori “sedang” dan “baik”. Hal ini memberikan indikasi peningkatan kinerja demokrasi secara umum di Indonesia dibandingkan 2013, dimana enam provinsi berada pada kategori “buruk”.

Grafik 1. Perkembangan IDI berdasarkan Provinsi, 2013-2014



<http://jateng.bps.go.id>

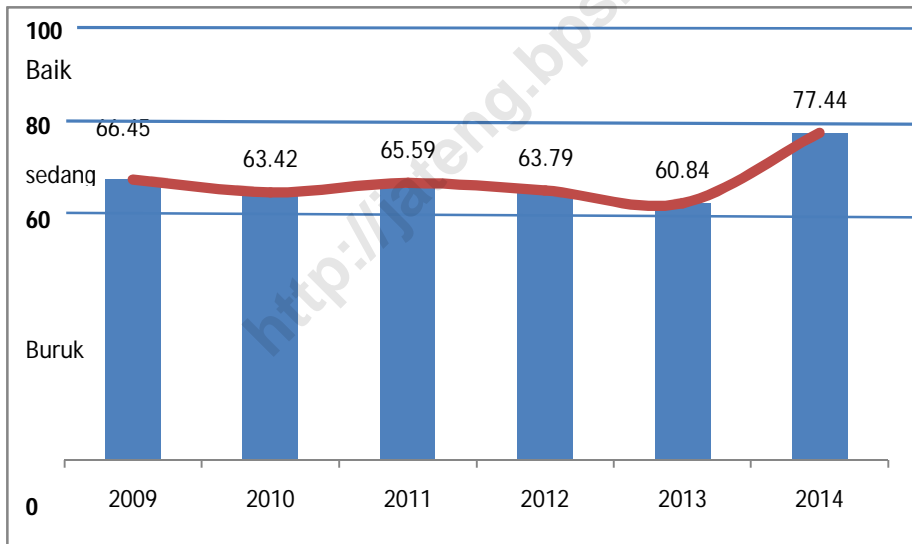
VI. IDI Jawa Tengah 2014

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah 2014 sebesar 77,44, naik 16,60 poin dibandingkan dengan IDI Jawa Tengah 2013 sebesar 60,84. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi di Jawa Tengah secara umum masih dalam kategori sedang.

Perubahan IDI dari 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi (**Grafik 2.**). Nilai IDI 2014 merupakan capaian tertinggi selama 6 tahun penghitungan IDI (2009-2014). Fluktuatifnya angka IDI adalah cermin dinamika situasi demokrasi di Jawa Tengah.

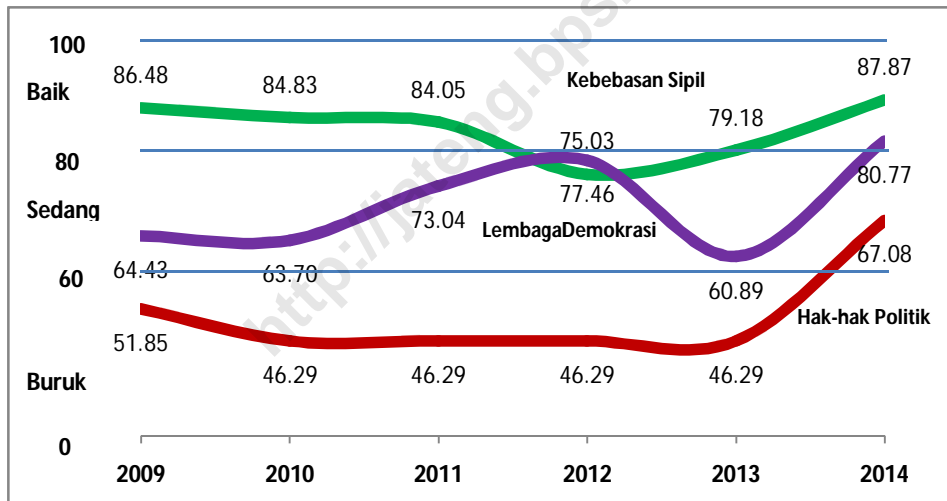
Angka IDI 2014 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil sebesar 87,87; aspek Hak-hak Politik sebesar 67,08; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 80,77.

Grafik 2. Perkembangan IDI Provinsi Jawa Tengah, 2009-2014



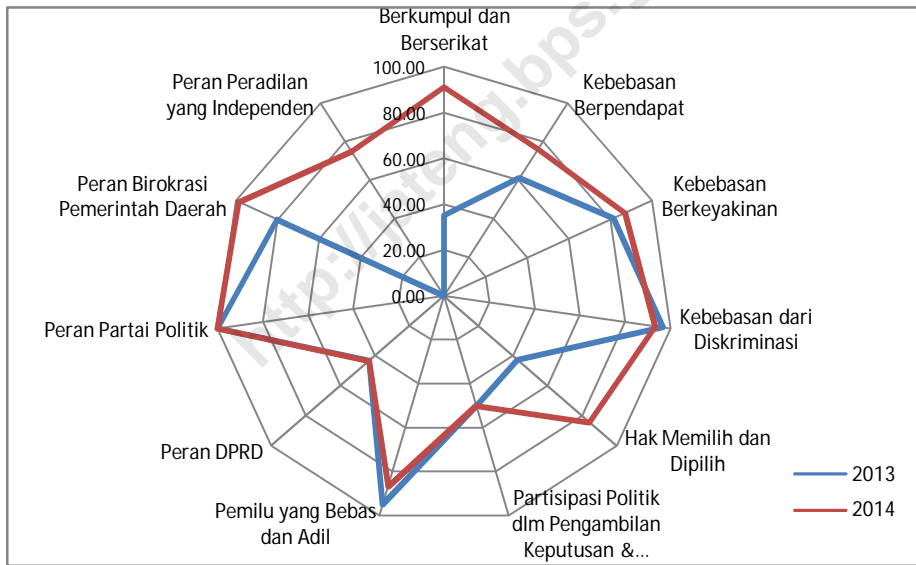
Nilai indeks dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada 2014 mengalami peningkatan dibandingkan 2013, yaitu meningkat sebesar 20,79 point (Indeks aspek Hak-hak politik); 19,88 poin (indeks aspek lembaga demokrasi) dan 8,69 poin (indeks aspek kebebasan sipil). Peningkatan nilai indeks menyebabkan pola sebaran kategori berubah dengan tahun pengukuran sebelumnya, yaitu kebebasan sipil dan lembaga demokrasi secara umum dari kategori “sedang” menjadi “baik”, dan hak-hak politik berubah dari “buruk” menjadi “sedang”. Perlu menjadi perhatian, pada aspek hak-hak politik kendati terdapat perbaikan pada hak memilih dan dipilih namun masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah. Sementara dari aspek lembaga demokrasi peran DPRD masih cenderung rendah.

Grafik 3. Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi Jawa Tengah, 2009-2014



Variabel pada IDI 2014 terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan indeks, empat variabel mengalami penurunan dan satu variabel yang tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2013. Kenaikan terbesar pada indeks variabel peran peradilan yang independen. **Grafik 4.** memperlihatkan variabel peran peradilan yang independen meningkat dari kategori buruk menjadi sedang, dari 00,00 pada 2013 menjadi 75,00 pada 2014. Indeks variabel lain yang meningkat cukup berarti diantaranya kebebasan berkumpul dan berserikat (dari 35,00 pada 2013 menjadi 91,25 pada 2014) dan hak memilih dan dipilih (dari 42,59 pada 2013 menjadi 84,16 pada 2014).

Grafik 4. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Jawa Tengah, 2013-2014



Tabel 1. Skor Indikator IDI Menurut Aspek Kebebasan Sipil, 2013 dan 2014

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Selisih 2014- 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Aspek Kebebasan Sipil		86,48	84,83	84,05	75,03	79,18	87,87	8,69
I	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	78,75	55,00	51,88	81,88	35,00	91,25	56,25
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	90,00	50,00	50,00	90,00	40,00	90,00	50,00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	0,00	90,00	65,00	25,00	0,00	100,00	100,00
II	Kebebasan Berpendapat	50,02	0,00	74,97	47,20	61,09	76,12	15,03
3	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	40,00	0,00	90,00	56,67	73,33	73,33	0,00
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
III	Kebebasan Berkeyakinan	93,22	96,42	86,44	75,32	81,31	87,06	5,75
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100,00	100,00	100,00	100,00	91,30	91,30	0,00
6	Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	87,50	100,00	75,00	40,00	100,00	87,50	-12,50
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	70,00	80,00	40,00	0,00	30,00	70,00	40,00

Tabel 1. (Lanjutan)

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Selisih 2014- 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Aspek Kebebasan Sipil		86,48	84,83	84,05	75,03	79,18	87,87	8,69
IV	Kebebasan dari Diskriminasi	86,93	100,00	93,05	82,75	96,53	93,23	-3,30
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	6,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
9	Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst	100,00	100,00	75,00	77,50	87,50	87,50	0,00
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender	100,00	100,00	100,00	66,67	100,00	90,00	-10,00

Tabel 2. Skor Indikator IDI Menurut Hak-Hak Politik, 2013 dan 2014

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Selisih 2014- 2013
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)
Aspek Hak-Hak Politik		51,85	46,29	46,29	46,29	46,29	67,08	20,79
I	Hak Memilih dan Dipilih	42,59	42,59	42,59	42,59	42,59	84,16	41,57
1	Hak memilih atau dipilih terhambat	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	92,95	58,33
2	Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	10,00
3	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	89,65	59,65
4	<i>Voters turnout</i>	71,26	71,26	71,26	71,26	71,26	73,24	1,98
5	% Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	76,67	6,67
II	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	61,11	50,00	50,00	50,00	50,50	50,50	0,00
6	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	69,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	52,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Tabel 3. Skor Indikator IDI Menurut Aspek Lembaga Demokrasi, 2013 dan 2014

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Selisih 2014- 2013
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)
Aspek Lembaga Demokrasi		64,43	63,70	73,04	77,46	60,89	80,77	19,88
I	Pemilu yang Bebas dan Adil	94,94	94,94	94,94	94,94	94,94	86,71	-8,23
1	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	0,00
2	Kecurangan dalam penghitungan suara	89,87	89,87	89,87	89,87	89,87	73,42	-16,45
II	Peran DPRD	69,88	42,60	69,48	41,01	43,32	43,22	-0,10
3	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	100,00	63,54	100,00	52,10	54,97	54,81	-0,16
4	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	25,00	0,00	18,18	38,46	41,18	41,18	0,00
5	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	0,00
III	Peran Partai Politik	5,01	57,35	98,06	100,00	100,00	99,96	-0,04
6	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu	0,00	57,14	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	% perempuan dalam kepengurusan partai politik	50,07	59,22	80,59	100,00	100,00	99,64	-0,36
IV	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	80,30	80,30	80,30	80,30	80,30	98,48	18,18
8	Laporan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol dalam pemilu legislatif	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	100,00	9,10
9	Laporan keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu legislatif	69,70	69,70	69,70	69,70	69,70	96,97	27,27

Tabel 3. (Lanjutan)

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Selisih 2014- 2013
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)
Aspek Lembaga Demokrasi		64,43	63,70	73,04	77,46	60,89	80,77	19,88
V	Peran Peradilan Yang Independen	75,00	50,00	32,50	75,00	0,00	75,00	75,00
10	Keputusan hakim yang kontroversial	50,00	100,00	65,00	50,00	0,00	50,00	50,00
11	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

<http://jateng.bps.go.id>

VII. Penutup

Data IDI sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan politik dan demokrasi sekaligus sebagai acuan bagi pemerintah baik dalam melakukan evaluasi terhadap pembangunan bidang politik maupun dalam mengambil kebijakan sangat bergantung kepada *stakeholder* yang terkait, mulai dari Pokja IDI dalam mensosialisasikan data IDI, pemerintah/instansi hingga partai politik yang terlibat dalam pengumpulan data IDI. Oleh karena itu dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan serta untuk meningkatkan perkembangan demokrasi dan pembangunan di bidang politik khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah sangat diharapkan peran aktif pihak-pihak yang terlibat. Sehingga dengan demikian diharapkan data IDI yang dihasilkan merupakan data IDI yang akurat sehingga pemerintah diharapkan dapat melaksanakan berbagai program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. (024) 8412802 – 8412804, Fax. (024) 8311195

Homepage : <http://jateng.bps.go.id>, E-mail : bps3300@bps.go.id

ISBN 978-602-0916-60-6



9 786020 916606